



Politik Identitas di Indonesia: Interaksi Agama, Etnisitas, dan Media Sosial dalam Dinamika Kontestasi Politik

Hendi Rustandi^{1*}

¹ Institut Agama Islam Persis Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 26, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 24, 2025

Available online December 24, 2025

Kata Kunci:

Politik Identitas, Agama, Etnisitas, Media Sosial, Demokrasi Indonesia, Polarisasi, Kontestasi Politik

Keywords:

Identity Politics, Religion, Ethnicity, Social Media, Indonesian Democracy, Polarization, Political Contestation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dinamika politik identitas di Indonesia dengan menekankan pada interaksi antara agama, etnisitas, dan media sosial dalam membentuk kontestasi politik di era demokrasi digital. Menggunakan pendekatan konseptual interseksionalitas dan teori framing, artikel ini menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut saling menguatkan dalam menciptakan polarisasi identitas yang memengaruhi preferensi elektoral, persepsi publik, dan formasi opini politik. Studi ini menguraikan bagaimana media sosial menjadi akselerator utama dalam menyebarkan narasi eksklusif berbasis identitas, yang sering kali memperdalam fragmentasi sosial dan melemahkan deliberasi demokratis. Melalui analisis terhadap berbagai kasus kontemporer seperti Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, artikel ini menyoroti bahwa politik identitas bukan hanya alat mobilisasi, tetapi telah menjadi strategi kekuasaan yang terinstitusionalisasi. Di sisi lain, penelitian ini mengajukan berbagai strategi mitigasi, termasuk pendidikan multikultural, regulasi media digital yang etis, afirmasi kebijakan untuk kelompok rentan, serta kepemimpinan politik transformatif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik dan kebijakan tentang penguatan demokrasi inklusif di tengah masyarakat pluralistik.

ABSTRACT

This article analyzes the dynamics of identity politics in Indonesia, emphasizing the interaction between religion, ethnicity, and social media in shaping political contestation in the era of digital democracy. Using the conceptual approach of intersectionality and framing theory, this article demonstrates that these three elements mutually reinforce each other, creating identity polarization that influences electoral preferences, public perception, and political opinion formation. This study outlines how social media has become a key accelerator in the spread of exclusive, identity-based narratives, which often deepen social fragmentation and undermine democratic deliberation. Through an analysis of contemporary cases such as the 2017 Jakarta gubernatorial election and the 2024 presidential election, this article highlights that identity politics is not merely a tool of mobilization but has become an institutionalized strategy of power. Furthermore, this research proposes various mitigation strategies, including multicultural education, ethical digital media regulation, affirmative policies for vulnerable groups, and transformative political leadership. These findings contribute to academic and policy discourse on strengthening inclusive democracy in pluralistic societies.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang sangat tinggi. Data sensus menunjukkan bahwa lebih dari 1.300 kelompok etnis mendiami wilayah nusantara (BPS, 2020), sementara keberagaman agama diakui dalam konstitusi melalui pengakuan terhadap enam agama resmi. Keragaman ini menjadi fondasi sosial-politik yang kaya, namun juga menyimpan potensi konflik, terutama ketika identitas digunakan sebagai alat mobilisasi politik (Taylor, 1994).

*Corresponding author

E-mail addresses: edukasihendi@gmail.com (Hendi Rustandi)

Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami liberalisasi politik yang membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai kelompok sosial. Hal ini mendorong ekspresi identitas secara lebih bebas dalam ruang publik dan politik, termasuk melalui pembentukan partai berbasis agama atau etnis (Mietzner, 2010). Namun, kebebasan ini tidak selalu berjalan linier dengan penguatan demokrasi substantif. Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya politik identitas semakin menonjol, di mana identitas agama atau etnis digunakan bukan hanya sebagai alat representasi politik, tetapi juga sebagai sarana eksklusif terhadap kelompok lain (Gennaioli & Tabellini, 2018).

Politik identitas memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memungkinkan kelompok-kelompok marjinal memperjuangkan hak dan pengakuan kolektif mereka (Young, 2020). Namun di sisi lain, ia berisiko memperdalam polarisasi dan fragmentasi sosial, terutama ketika dimainkan secara instrumental oleh elite politik dalam kontestasi kekuasaan. Fenomena ini diperburuk oleh perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, yang memungkinkan penyebaran cepat narasi berbasis identitas. Media sosial berperan sebagai ruang gema (echo chamber) yang memperkuat persepsi kelompok, menyebarkan hoaks, serta meminimalkan ruang dialog lintas identitas (Sunstein, 2001); (Kubin & Sikorski, 2023).

Kendati banyak studi telah membahas aspek-aspek terpisah dari politik identitas di Indonesia—misalnya dalam hal agama atau etnis—masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan secara simultan bagaimana ketiga elemen utama: agama, etnisitas, dan media sosial, saling berinteraksi dan membentuk lanskap kontestasi politik kontemporer Indonesia secara sistematis.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana interaksi antara agama, etnisitas, dan media sosial membentuk pola politik identitas di Indonesia, serta apa dampaknya terhadap kohesi sosial dan dinamika demokrasi? Dengan menjawab pertanyaan ini, artikel ini ingin memberikan kontribusi teoritis dan praktis, khususnya dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner yang komprehensif untuk memahami fenomena politik identitas di negara-negara multikultural seperti Indonesia.

Dengan membahas dimensi konseptual, historis, dan empiris, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah sekaligus memberikan pijakan kebijakan yang tepat dalam mengelola keragaman identitas secara adil dan konstruktif.

2. KAJIAN LITERATUR

Untuk memahami dinamika politik identitas di Indonesia, tulisan ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan empat kerangka teori utama.

Pertama, Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner (Tajfel & Turner, 1979) menjelaskan bahwa individu membentuk identitas melalui afiliasi terhadap kelompok sosial tertentu, seperti agama dan etnis. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia cenderung membentuk solidaritas berdasarkan kesamaan identitas, seperti "kami" (ingroup) dan "mereka" (outgroup). Proses kategorisasi sosial ini menghasilkan bias kelompok dan berpotensi menimbulkan konflik ketika perbedaan identitas dimanipulasi dalam kontestasi politik (Tajfel & Turner, 1979).

Kedua, Teori Pembingkai (Framing Theory) dari Robert Entman (Entman, 1993) digunakan untuk menjelaskan bagaimana media—terutama media sosial—membingkai isu-isu identitas dalam cara yang memengaruhi persepsi dan opini publik. Framing menentukan aspek mana dari suatu isu yang ditonjolkan dan mana yang disembunyikan, sehingga dapat memperkuat atau melemahkan solidaritas identitas kelompok tertentu. Dalam politik identitas, framing digunakan oleh aktor politik untuk menekankan narasi keagamaan atau etnisitas guna memperoleh dukungan publik (Entman, 1993).

Ketiga, artikel ini menggunakan Teori Ruang Gema (Echo Chamber) dari Cass Sunstein (2001), yang menjelaskan bagaimana media sosial memperkuat pendapat dan keyakinan

pengguna dengan menyaring konten yang sejalan dengan pandangan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang homogen dan menghambat dialog lintas identitas. Dalam konteks Indonesia, ruang gema ini sangat berpengaruh dalam memperkuat polarisasi politik berbasis agama dan etnis, karena pengguna cenderung hanya berinteraksi dengan informasi yang memperkuat identitas kelompok mereka (Sunstein, 2001; Kubin & Sikorski, 2023).

Keempat, pendekatan politik afektif dan populisme menjadi penting dalam menjelaskan mengapa politik identitas begitu kuat dalam memengaruhi pemilih. Menurut Moffitt (Moffitt, 2016), populisme tidak hanya menyampaikan program politik, tetapi juga memainkan gaya emosional dan performatif untuk membentuk keterikatan emosional antara pemimpin dan pendukung. Bos et al. (Bos et al., 2019) menambahkan bahwa populisme menggunakan framing sosial identitas untuk menciptakan dikotomi antara “rakyat” dan “elit”, serta menyasar perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Dalam hal ini, emosi seperti ketakutan atau kemarahan terhadap kelompok lain digunakan untuk memperkuat ikatan identitas politik.

Dengan mengintegrasikan keempat teori tersebut, artikel ini berupaya menjelaskan secara komprehensif bagaimana agama, etnisitas, dan media sosial tidak hanya berdiri sebagai faktor yang terpisah, tetapi saling berinteraksi dan memperkuat dalam membentuk lanskap politik identitas di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual-empiris untuk mengkaji dinamika politik identitas di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan interpretasi mendalam terhadap fenomena kompleks berupa interaksi agama, etnisitas, dan media sosial dalam konteks politik (Creswell & Poth, 2018). Penelitian menggunakan desain studi kasus multipel dengan fokus pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019-2024.

Kerangka teoritis mengintegrasikan Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1979), Teori Framing (Entman, 1993), Teori Ruang Gema (Sunstein, 2001), dan Teori Politik Afektif (Moffitt, 2016). Data primer berupa dokumen resmi hasil pemilu, laporan survei elektoral LSI dan Indikator Politik Indonesia, serta konten media sosial kampanye politik. Data sekunder meliputi literatur akademik terkini tentang politik identitas dan demokrasi digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, analisis konten digital dengan sampling purposif terhadap konten viral selama kampanye, dan analisis data survei eksisting. Periode pengumpulan data mencakup 2017-2024 untuk analisis longitudinal evolusi politik identitas di era digital (Van Dijck et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama sebagai Basis Politik Identitas

Agama memainkan peran krusial dalam pembentukan identitas kolektif masyarakat Indonesia. Sejak era kolonial, organisasi seperti Sarekat Islam dan Nahdlatul Ulama telah menggunakan nilai-nilai agama sebagai instrumen perjuangan politik dan sosial dalam melawan penjajahan (Noer, 1973). Agama menjadi sumber solidaritas sosial dan sekaligus landasan moral dalam gerakan kebangsaan. Pengaruh historis ini menjadikan agama tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi politik.

Dalam politik kontemporer, agama tetap memainkan peran sentral dalam membentuk identitas politik masyarakat. Salah satu titik balik yang paling mencolok adalah Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu keagamaan digunakan secara eksplisit dalam membingkai lawan politik, terutama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang berlatar belakang etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Narasi keagamaan dalam kampanye politik tersebut tidak

hanya dimobilisasi oleh aktor politik, tetapi juga diperkuat melalui media sosial dan ceramah keagamaan, yang kemudian mendorong polarisasi sosial secara tajam (Mietzner & Muhtadi, 2018).

Fenomena serupa kembali terlihat dalam Pilpres 2024. Meskipun para kandidat berusaha menampilkan citra inklusif, sentimen berbasis agama tetap mewarnai preferensi pemilih. Misalnya, pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar mendapat dukungan kuat dari basis pemilih Muslim konservatif dan jaringan pesantren tradisional, sementara Ganjar Pranowo–Mahfud MD mendapat dukungan signifikan dari kelompok Islam moderat dan nasionalis. Dalam berbagai survei seperti LSI (2024) dan Indikator Politik Indonesia, orientasi keagamaan pemilih menjadi salah satu determinan penting dalam pola dukungan politik. Selain itu, kampanye di media sosial memperlihatkan bagaimana narasi keagamaan—baik secara simbolik maupun eksplisit—digunakan untuk memperkuat loyalitas politik kelompok tertentu, sering kali dengan mengorbankan narasi kebangsaan yang inklusif.

Kehadiran partai-partai berbasis agama seperti PKS, PPP, atau PKB juga menunjukkan bahwa agama tetap menjadi bahasa politik yang efektif. Namun, ketika agama dijadikan alat untuk mengasingkan kelompok lain, seperti minoritas agama atau etnis, maka politik identitas berbasis agama berubah menjadi eksklusivisme yang berbahaya bagi kohesi sosial. Fenomena ini memperkuat dikotomi “kami” versus “mereka” yang berdampak negatif terhadap stabilitas demokrasi dan keberagaman Indonesia (Liddle & Mujani, 2019).

Etnisitas dan Politik Lokal

Etnisitas merupakan salah satu unsur identitas sosial yang signifikan dalam membentuk perilaku politik, terutama dalam konteks lokal di Indonesia yang sangat pluralistik. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, kompetisi politik lokal di Indonesia kerap dibingkai oleh afiliasi etnis yang kuat (Ananta et al., 2015). Dalam banyak kasus, ikatan primordial ini dimobilisasi secara strategis oleh aktor politik lokal untuk membangun dukungan berbasis kesamaan identitas. Teori primordialisme menjelaskan bahwa loyalitas etnis bersifat laten dan dapat diaktifkan ketika terjadi kontestasi kekuasaan atau ketimpangan distribusi sumber daya (Geertz, 1973).

Pada praktiknya, pemilihan kepala daerah (pilkada) sering menjadi ajang kontestasi politik identitas berbasis etnis. Kandidat yang berasal dari etnis mayoritas di suatu wilayah sering kali memperoleh keuntungan elektoral dibanding kandidat dari etnis minoritas. Sebagai contoh, dalam Pilkada Kalimantan Barat, ketegangan antara etnis Dayak dan Melayu kerap memengaruhi peta dukungan politik (Qodir et al., 2022). Di Papua, identitas etnis digunakan untuk menegaskan hak politik orang asli Papua (OAP), termasuk dalam aturan afirmatif tentang calon kepala daerah yang harus berasal dari etnis lokal (Kusumaryati, 2021).

Konsep clientelism juga penting dalam memahami politik etnis di tingkat lokal. Dalam konteks ini, elite politik etnis menjalin hubungan patron-klien dengan komunitasnya untuk menjaga loyalitas dan kontrol sosial. Hubungan ini sering melibatkan pertukaran sumber daya, jabatan, atau proyek pembangunan berbasis wilayah etnis tertentu (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Etnisitas tidak hanya menjadi sumber dukungan politik, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik apabila dikelola secara eksklusif. Ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan atau sumber daya antaretnis dapat memicu rasa marginalisasi yang berujung pada kekerasan kolektif. Sebagai contoh, kerusuhan di Ambon (1999–2002) dan Poso sebagian besar dipicu oleh ketegangan horizontal berbasis agama dan etnis, yang kemudian dieksploitasi oleh kepentingan politik lokal (Bertrand, 2004).

Pada Pilpres 2024, kendati isu agama lebih dominan dalam wacana publik, etnisitas tetap memainkan peran penting, terutama dalam pembentukan aliansi politik dan persebaran dukungan wilayah. Pemilih etnis Jawa, misalnya, menunjukkan kecenderungan kuat dalam

mendukung calon presiden yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang sama, seperti terlihat dalam basis suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan DIY (LSI, 2024). Sementara itu, di wilayah Indonesia timur, identitas etnis lebih dikaitkan dengan aspirasi kedaulatan lokal dan keadilan distribusi, bukan hanya soal keterwakilan simbolik.

Dengan demikian, etnisitas dalam politik lokal Indonesia merupakan faktor yang kompleks: ia bisa menjadi wahana demokratisasi dan representasi, tetapi juga sumber fragmentasi jika tidak ditangani secara inklusif. Kebijakan afirmatif, distribusi kekuasaan yang adil, serta pendidikan multikultural menjadi kunci dalam meredam eksese negatif dari politisasi etnis.

Media Sosial dan Polarisasi Identitas

Media sosial telah menjadi katalis utama dalam transformasi komunikasi politik modern, terutama dalam membentuk dan memperkuat politik identitas. Platform seperti Facebook, Twitter (X), TikTok, dan Instagram tidak hanya menjadi ruang ekspresi identitas, tetapi juga arena kontestasi simbolik di mana agama dan etnis dikomodifikasi dalam narasi politik (Törnberg, 2020).

Salah satu fenomena penting yang muncul adalah ruang gema (echo chamber), di mana algoritma platform media sosial menyaring informasi agar sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini menyebabkan pengguna lebih sering terpapar informasi yang memperkuat keyakinan awal mereka, sehingga mempersempit ruang dialog lintas identitas (Sunstein, 2001; Kubin & Sikorski, 2023). Studi oleh Barberá et al. (2015) menunjukkan bahwa interaksi sosial di media digital cenderung mengonsolidasikan opini yang sudah terbentuk sebelumnya, memperkuat polarisasi politik.

Media sosial juga memperkuat politik afektif, yakni penggunaan emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kebanggaan kolektif sebagai alat mobilisasi politik (Papacharissi, 2015). Dalam konteks Indonesia, isu-isu yang mengandung dimensi agama atau etnis dengan mudah menjadi viral karena muatan afektif yang tinggi. Misalnya, selama Pilpres 2019 dan 2024, tagar seperti #2019GantiPresiden dan #JokowiAminMenang digunakan untuk menegaskan identitas politik berbasis sentimen keagamaan, dan dalam banyak kasus menyulut perdebatan yang tajam antar kelompok dengan afiliasi ideologis yang berbeda (Mietzner, 2020).

Teori framing dari Entman (1993) dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana narasi keagamaan atau kesukuan dibingkai sedemikian rupa dalam media sosial untuk membentuk persepsi publik. Narasi tentang “pembela Islam” versus “musuh agama”, atau tentang “pribumi versus asing” kerap dijadikan bingkai untuk menyederhanakan isu-isu politik kompleks dan menggugah emosi kolektif. Misalnya, framing terhadap sosok Anies Baswedan sebagai simbol representasi Islam urban dalam Pilpres 2024 diperkuat melalui media sosial oleh simpatisannya, berlawanan dengan narasi tentang pluralisme yang dilekatkan pada Ganjar Pranowo.

Kekhawatiran utama dari polarisasi ini adalah munculnya identitas politik yang kaku dan biner, di mana seseorang hanya dilihat berdasarkan afiliasi identitasnya—bukan argumen atau program kebijakannya. Dalam jangka panjang, hal ini mengancam deliberasi demokratis dan mempersempit ruang kompromi politik (Iyengar & Westwood, 2015).

Penelitian terbaru dari Pew Research Center (2023) juga mengonfirmasi bahwa masyarakat yang aktif di media sosial memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terpolarisasi secara ideologis, karena seringkali tidak terpapar pada sudut pandang alternatif. Kondisi ini sangat relevan dengan Indonesia yang memiliki tingkat penetrasi internet tinggi dan keterlibatan politik digital yang intens, terutama di kalangan generasi muda.

Dengan demikian, media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran politik identitas, tetapi juga memperdalam fragmentasi sosial. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang

menggabungkan literasi digital, regulasi etis platform digital, dan penguatan ruang dialog lintas identitas untuk mencegah radikalisasi wacana identitas di ruang maya.

Interaksi dan Implikasi Politik

Interaksi antara agama, etnisitas, dan media sosial telah melahirkan lanskap politik identitas yang saling memperkuat satu sama lain dalam konteks demokrasi Indonesia. Ketiganya tidak lagi berdiri sebagai elemen terpisah, melainkan membentuk struktur dinamis yang memengaruhi preferensi politik, formasi opini publik, dan pola mobilisasi elektoral. Dalam pemilu dan pilkada, afiliasi identitas semakin menonjol sebagai basis dukungan, menggantikan preferensi rasional atas program dan kebijakan (Liddle & Mujani, 2019).

Keterkaitan ini dapat dipahami melalui pendekatan interseksionalitas identitas politik (Crenshaw, 1991), yang menekankan bahwa individu membawa lebih dari satu kategori identitas dalam interaksi sosial-politik mereka. Di Indonesia, identitas sebagai Muslim, Jawa, atau pengguna media sosial yang aktif saling bersinggungan dalam membentuk keputusan politik, yang sering kali diarahkan oleh framing digital dan tekanan kelompok. Hal ini membuat batas antara ekspresi politik, loyalitas komunitas, dan partisipasi digital menjadi kabur.

Implikasi dari fenomena ini tampak jelas dalam kualitas demokrasi deliberatif. Polarisasi yang berakar pada politik identitas menghambat perdebatan substantif antar aktor politik dan publik. Studi oleh McCoy et al. (McCoy et al., 2018) menunjukkan bahwa polarisasi identitas dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi, memperkuat ketegangan horizontal, dan memunculkan politik zero-sum, di mana satu kelompok hanya menang jika kelompok lain kalah. Ini menciptakan budaya politik yang eksklusif dan kompetitif secara destruktif.

Selain itu, orientasi kebijakan publik pun cenderung bias, terutama ketika elite politik menggunakan isu identitas untuk menjaga dukungan elektoral. Kebijakan yang lahir dari tekanan politik identitas berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pluralisme. Di beberapa daerah, kelompok etnis minoritas atau pemeluk agama minoritas mengalami hambatan dalam mengakses hak politik dan sosial karena tidak masuk dalam konstruksi identitas dominan (Hariman, 2022).

Fenomena ini diperparah oleh peran media sosial sebagai akselerator polarisasi. Alih-alih menjadi ruang deliberatif yang mempertemukan keragaman gagasan, media digital lebih sering menjadi arena pertempuran identitas simbolik yang tidak jarang diwarnai disinformasi dan ujaran kebencian. Struktur algoritmik media sosial memperkuat polarisasi dengan mengoptimalkan konten-konten ekstrem dan afektif (Guess et al., 2023).

Politik identitas yang berakar pada interaksi agama, etnisitas, dan media sosial bukan sekadar respons terhadap ketimpangan representasi, tetapi telah menjadi strategi dominan dalam kompetisi kekuasaan di era digital. Untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, penting untuk membangun infrastruktur sosial dan politik yang mendorong solidaritas lintas identitas serta memperkuat institusi-institusi mediasi konflik dan representasi politik yang adil.

Strategi Meredam Politik Identitas

Untuk meredam dampak negatif politik identitas yang berakar pada agama, etnisitas, dan media sosial, diperlukan pendekatan multidimensi yang bersifat preventif dan transformatif. Salah satu pendekatan kunci adalah melalui penguatan ketahanan sosial yang berbasis pada inklusi dan keadilan. Ketahanan sosial mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menjaga kohesi dan solidaritas di tengah perbedaan identitas, termasuk saat menghadapi tekanan politik dan konflik (Bergh & Siegel, 2021).

Peran negara menjadi sangat vital dalam menyediakan kerangka regulatif dan kebijakan afirmatif yang adil dan berimbang. Kebijakan seperti representasi politik untuk kelompok minoritas, perlindungan hukum atas hak-hak sipil mereka, dan distribusi sumber daya berbasis keadilan sosial dapat mengurangi ketimpangan struktural yang sering menjadi akar dari

politisasi identitas (Kymlicka, 2015). Dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmatif seperti kewajiban keterwakilan perempuan atau orang asli Papua dalam politik lokal merupakan contoh penting yang perlu diperluas secara inklusif.

Regulasi terhadap media sosial juga perlu diperkuat secara proporsional dan demokratis. Penelitian oleh Guess et al. (2023) menekankan pentingnya regulasi berbasis prinsip transparansi algoritma dan akuntabilitas platform untuk mencegah disinformasi dan ujaran kebencian. Di sisi lain, pendekatan represif yang terlalu mengekang kebebasan berekspresi justru dapat memperkuat sentimen eksklusif yang diklaim oleh kelompok identitas tertentu. Oleh karena itu, regulasi media sosial harus diimbangi dengan kampanye literasi digital untuk mendorong pengguna lebih kritis dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi.

Dalam sektor pendidikan, penting untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural dan kewargaan digital ke dalam kurikulum nasional. Pendidikan yang menekankan pada nilai toleransi, penghargaan terhadap keragaman, serta keterampilan berpikir kritis di ruang digital akan membentuk generasi yang mampu merespons perbedaan secara konstruktif. Studi Korostelina (Korostelina, 2008) menunjukkan bahwa pendidikan sejarah yang inklusif mampu memperkuat identitas nasional tanpa menghapus identitas kultural lokal.

Penting pula mendorong terbentuknya ruang-ruang dialog antar-identitas yang difasilitasi oleh masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan media independen. Dialog ini bukan hanya seremonial, tetapi bertujuan membangun empathy bridge—jembatan empati antar kelompok sosial—melalui pengalaman bersama, narasi lintas identitas, dan praktik kolaboratif (Putnam, 2007). Program seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atau dialog antar etnis berbasis komunitas bisa diperluas cakupannya dengan dukungan negara dan lembaga donor.

Upaya meredam politik identitas juga menuntut kepemimpinan politik yang transformatif—yakni pemimpin yang tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi mampu membangun narasi kebangsaan yang menyatukan, melampaui garis-garis identitas sempit. Pemimpin semacam ini perlu didukung oleh media yang beretika serta publik yang memiliki literasi identitas dan kesadaran demokrasi yang tinggi.

5. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa politik identitas di Indonesia bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara agama, etnisitas, dan media sosial. Ketiganya saling menopang dan membentuk lanskap politik yang sering kali diwarnai oleh eksklusivisme, fragmentasi sosial, dan penguatan loyalitas berbasis simbol identitas. Temuan ini menegaskan pentingnya membaca politik kontemporer Indonesia tidak hanya dari dimensi struktural, tetapi juga kultural dan digital.

Kontribusi utama dari tulisan ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengaitkan dimensi konseptual, historis, dan empiris untuk memahami politik identitas. Dengan menggunakan teori identitas sosial, framing, ruang gema, dan populisme afektif, artikel ini memberikan kerangka analitis yang dapat dijadikan pijakan bagi studi lanjutan maupun pengembangan strategi kebijakan.

Implikasi praktis dari kajian ini mencakup pentingnya membangun ketahanan sosial melalui pendidikan multikultural, regulasi media yang etis dan transparan, serta kepemimpinan politik yang transformatif. Dalam konteks kebijakan publik, diperlukan afirmasi terhadap kelompok minoritas dan penguatan ruang dialog antar-identitas guna menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Untuk pengembangan lebih lanjut, studi lanjutan dapat diarahkan pada analisis kuantitatif terhadap dampak disinformasi berbasis identitas di media sosial, evaluasi kebijakan afirmatif di tingkat lokal, atau eksplorasi terhadap narasi-narasi kebangsaan alternatif yang mampu menjembatani fragmentasi identitas di masyarakat. Kajian lintas disiplin yang memadukan

ilmu politik, komunikasi, dan sosiologi sangat diperlukan untuk memahami dan mengantisipasi evolusi politik identitas di era digital.

6. REFERENSI

- Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2015). *Emerging democracy in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Bergh, J., & Siegel, D. A. (2021). Social resilience in the face of polarization. *Political Psychology*, 42(S1), 23–40. <https://doi.org/10.1111/pops.12722>
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bos, L., Schemer, C., Corbu, N., Hameleers, M., Andreadis, I., Schulz, A., & Boomgaarden, H. G. (2019). The effects of populism as a social identity frame on persuasion and mobilisation: Evidence from a 15-country experiment. *European Journal of Political Research*, 58(1), 68–88. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12334>
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4, Ed.). SAGE Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Guess, A., Nyhan, B., & Reifler, J. (2023). Exposure to untrustworthy websites in the 2020 US election. *Nature Human Behaviour*, 7(2), 211–221. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01463-w>
- Hariman, R. (2022). Representasi identitas dan diskriminasi dalam kebijakan lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(1), 15–32. <https://doi.org/10.22146/jsp.68542>
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and loathing across party lines: New evidence on group polarization. *American Journal of Political Science*, 59(3), 690–707. <https://doi.org/10.1111/ajps.12152>
- Korostelina, K. V. (2008). *History education in the formation of social identity: Toward a culture of peace*. Palgrave Macmillan.
- Kubin, E., & Sikorski, C. (2023). The role of echo chambers and algorithmic curation in political polarization. *Current Opinion in Psychology*, 48, 101565. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101565>
- Kusumaryati, V. (2021). Ethnography of the state: Protest, citizenship, and performance in West Papua. *Cultural Anthropology*, 36(2), 271–299. <https://doi.org/10.14506/ca36.2.08>
- Kymlicka, W. (2015). Solidarity in diverse societies: Beyond neoliberal multiculturalism and welfare chauvinism. *Comparative Migration Studies*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s40878-015-0017-4>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2019). Indonesian democracy and the transformation of political Islam. *Journal of Democracy*, 30(4), 115–129. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0068>
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: Common patterns, dynamics, and pernicious consequences. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16–42. <https://doi.org/10.1177/0002764218759576>
- Mietzner, M. (2010). Indonesia's direct elections: Empowering the electorate or entrenching the New Order? In *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. ISEAS Publishing.
- Mietzner, M. (2020). Populism, religious intolerance, and democratic decay in Indonesia. *Democratization*, 27(2), 372–390. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1708476>

- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Moffitt, B. (2016). *The global rise of populism: Performance, political style, and representation*. Stanford University Press.
- Noer, D. (1973). *The modernist Muslim movement in Indonesia 1900–1942*. Oxford University Press.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137–174. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x>
- Qodir, Z., Hidayah, N., & Haryanto, D. (2022). Politik identitas dan konflik etnis dalam Pilkada Kalimantan Barat. *Jurnal Politik*, 7(1), 89–105. <https://doi.org/10.22146/jp.70327>
- Sunstein, C. R. (2001). *Echo chambers: Bush v. Gore, impeachment, and beyond*. Princeton University Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (pp. 25–73). Princeton University Press.
- Törnberg, A. (2020). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion. *PLOS ONE*, 15(9), e0238771. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238771>